

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik(BPS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2017). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (umkm) dan usaha besar (ub) tahun 2016 - 2017. In *Depkop* (Issue 1). <http://www.depkop.go.id/data-umkm>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Fungsi Pajak | Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved May 13, 2022, from <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Program Business Development Services: Upaya Nyata DJP Bangkitkan UMKM | Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved May 13, 2022, from <https://pajak.go.id/id/artikel/program-business-development-services-upaya-nyata-djp-bangkitkan-umkm>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018. In *Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional*. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan Tahunan DJP 2018 - bahasa Indonesia.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202018%20-%20bahasa%20Indonesia.pdf).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019* (Issue December). <https://www.speakindonesia.org/peningkatan-kapasitas/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*.
- Ilham, M., & Hiktaop, K. (2020). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Musamus Accounting Journal*, 2(2), 61–70. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/acc/article/view/3095>.
- Kementerian Keuangan. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. In *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Informasi APBN 2021*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.

- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178.
- Pemerintah Kota Sukabumi. (n.d.). *Geografis – Portal Resmi Kota Sukabumi*. Retrieved May 13, 2022, from <https://portal.sukabumikota.go.id/geografis/>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (n.d.-a). *Jumlah Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Jawa Barat*. Retrieved May 13, 2022, from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kelurahan-berdasarkan-kecamatan-di-jawa-barat>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (n.d.-b). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Retrieved May 13, 2022, from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2013).
- Rochmadika, D. (2015). *PAJAK RESTORAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013)*. 1(1), 1–10.
- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh FINAL PADA KPP PRATAMA MANADO. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 362–370. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26289.2019>.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS), (2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (1983).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).